

**ANALISIS KOMPETENSI KEWARGANEGARAAN DALAM KURIKULUM 2013
DENGAN KURIKULUM MERDEKA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN
PADA TINGKAT SEKOLAH DASAR**

Anggriana Manalu

PGSD, Universitas Negeri Medan

Apiek Gandamana

PGSD, Universitas Negeri Medan

Korespondensi penulis: manaluanggriana@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to determine the content of citizenship competencies in the 2013 curriculum with an independent curriculum in the subject of Citizenship Education at the elementary school level. This type of research is descriptive qualitative research. The research subjects were 3 elementary school teachers with the 2013 curriculum, 3 elementary school teachers with an independent curriculum and 1 expert lecturer on Citizenship Education. Data collection was carried out by interviews, observation and accompanied by documentation. The results of the first study show that the content of each civic competency domain in the Citizenship Education subject in the 2013 curriculum with an independent curriculum in elementary schools contains complete civic competency content consisting of citizenship knowledge, citizenship skills, and citizenship attitudes. Both are seen from operational verbs (KKO), the 2013 curriculum contains a civic knowledge component of 25%, a civic skills component of 25%, an attitude/character component of 50%. While the independent curriculum contains a Civics knowledge component of 31.37%, a Civics skills component of 41.18%, and a Civics attitude/character component of 27.45% then adds 20% strengthening the profile of Pancasila students. The two curricula both dominate the societal attitude/character component and have differences in the knowledge and skill components. The three citizenship competencies will provide an overview of the personal formation of students who have good personality traits and accurately reflect the values contained in the practice of Pancasila and the 1945 Constitution.

Keywords: Citizenship Competence, 2013 Curriculum, Independent Curriculum, Citizenship Education, Elementary School

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui muatan kompetensi kewarganegaraan dalam kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada tingkat sekolah dasar. Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian 3 guru sekolah dasar kurikulum 2013, 3 guru sekolah dasar

kurikulum merdeka dan 1 dosen ahli Pendidikan Kewarganegaraan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan disertai dengan dokumentasi. Hasil penelitian pertama menunjukkan bahwa muatan setiap ranah kompetensi kewarganegaraan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka disekolah dasar mengandung muatan kompetensi kewarganegaraan secara utuh yang terdiri dari pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, dan sikap kewarganegaraan. Kedua dicermati dari kata kerja operasional (KKO), kurikulum 2013 mengandung 25 % komponen pengetahuan kewarganegaraan, 25 % komponen keterampilan kewarganegaraan, 50 % komponen sikap/karakter. Sedangkan pada kurikulum merdeka mengandung 31,37 % komponen pengetahuan kewarganegaraan, 41,18 % komponen keterampilan kewarganegaraan, dan 27,45% komponen sikap/karakter kewarganegaraan kemudian ditambah 20 % penguatan profil pelajar Pancasila. Kedua kurikulum sama-sama mendominasi komponen sikap/karakter kewarganegaraan dan memiliki perbedaan pada komponen pengetahuan dan keterampilan. Ketiga kompetensi kewarganegaraan akan memberikan nampak pada pembentukan pribadi peserta didik yang memiliki karakter kepribadian yang baik dan benar mencerminkan nilai-nilai yang termuat dalam pengamalan Pancasila dan UUD 1945.

Kata kunci: Kompetensi Kewarganegaraan, Kurikulum 2013, Kurikulum Merdeka, Pendidikan Kewarganegaraan, Sekolah Dasar

LATAR BELAKANG

Pendidikan kewarganegaraan sangat penting untuk membangun karakter dan watak siswa menjadi warga negara yang berperilaku sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Dalam konteks pendidikan formal, keberadaan Pendidikan Kewarganegaraan melalui pola-pola pembelajaran yang humanis dan demokratis merupakan salah satu cara yang dibutuhkan saat ini, dimana nilai dan prinsip-prinsip demokratis yang sesungguhnya (*genuine democracy*) dapat dipraktikkan di ruang-ruang kelas maupun perkuliahan” (Ubaedillah, 2017, h.8).

Lubis (2018, h.25) mengatakan “Pendidikan Kewarganegaraan merupakan proses pembelajaran yang berusaha untuk membangun *civic knowledge*, *civic skill*, *civic disposition* peserta didik, sehingga tujuan untuk membentuk warga negara yang baik dapat terwujud”. Pembelajaran pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, tentunya ada kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik agar tujuan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dapat terwujud.

Kompetensi kewarganegaraan merupakan suatu kemampuan yang harus dikuasai oleh siswa, menguasai aspek pengetahuan, sikap, nilai serta norma dan keterampilan untuk mencapai tujuan pembentukan karakter pribadi warga negara yang bertanggung jawab serta demokratis. Dalam materi pelajaran pendidikan kewarganegaraan memiliki tiga komponen

kompetensi kewarganegaraan, yaitu: pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*), dan watak atau karakter kewarganegaraan (*civic disposition*) yang menjadi kompetensi sasaran dalam pembentukan karakter dan kepribadian warga negara. Ketiga kompetensi tersebut merupakan kompetensi yang diharapkan dari mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan baik dikurikulum 2013 maupun dikurikulum merdeka dengan istilah Pendidikan Pancasila.

Winataputra, Udin S (2001, h.26) menyatakan bahwa yang menjadi jantungnya dan benang emas yang mengikat unsur-unsur dalam membangun tatanan yang koheren dari semua sub sistem Pendidikan Kewarganegaraan adalah **civic knowledge**, yakni pengetahuan dan wawasan kewarganegaraan, **civic disposition**, yakni nilai, komitmen, dan sikap kewarganegaraan, dan **civic skill**, yakni perangkat keterampilan intelektual, sosial, personal kewarganegaraan yang seyogyanya dikuasai oleh setiap individu warga negara.

Pengembangan kurikulum dampaknya unsur-unsur perubahan mata pelajaran tahun 2013 dan tahun 2022 meliputi perubahan standar kompetensi lulusan, standar proses, standar isi, dan standar evaluasi dilakukan. Hal ini dimungkinkan atas dasar kepribadian, kemampuan serta beberapa keunggulan konseptual dari setiap kurikulum yang dikembangkan. Perubahan pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di tingkat sekolah dasar tentunya agar dapat mengakomodasikan perkembangan dan persoalan yang berkembang di masyarakat. Kajian sebelumnya pada kompetensi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ada terdapat ketidakseimbangan ranah kompetensi yang dikembangkan. Berdasarkan penelitian Gandamana (2021) berdasarkan ranah kompetensi terdapat ketidakseimbangan ranah kompetensi PKn sebagai muata KD untuk tiap-tiap SK baik di SD, SMP, maupun SMA. Pada tiga jenis pendidikan ini, aspek sikap dan perilaku yang menjadi “stressing” PKn proporsinya lebih sedikit bila dibandingkan dengan ranah pengetahuan.

Ditemukan permasalahan pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dikurikulum sebelumnya untuk satuan pendidikan tingkat Sekolah Dasar dari 57 KD, hanya 4 (7,02%) KD yang termasuk ranah afektif dan 16 (28,07%) KD yang termasuk ranah perilaku, sementara yang termasuk ranah pengetahuan 37 (64,91%) KD. Dari persentasi setiap ranah belum adanya kekonsistenan ranah dengan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan yang membentuk watak warga negara.

Winarno (2014, h.26-27) mengemukakan bahwa warga negara yang menerapkan unsur kompetensi kewarganegaraan, pada akhirnya warga negara yang memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan kewarganegaraan akan menjadi warga negara yang cerdas dan baik (*smart and good citizenship*). yaitu: pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*), dan watak atau karakter kewarganegaraan (*civic disposition*) yang menjadi kompetensi sasaran dalam pembentukan karakter dan kepribadian warga negara. Berdasarkan perubahan-perubahan yang terjadi didalam pengembangan kurikulum tentunya memiliki tujuan peningkatan mutu pendidikan, namun ketiga kompetensi kewarganegaraan tidak dapat dipisahkan dari ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan karena kompetensi tersebut akan berpengaruh pada ketercapaian tujuan pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum 2013 maupun kurikulum merdeka di tingkat sekolah dasar.

Kajian permasalahan terhadap pemenuhan unsur kompetensi kewarganegaraan pada kurikulum yang berlaku dalam mencapai tujuan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terutama di tingkat Sekolah Dasar membuat peneliti tertarik untuk melakukan analisis lebih mendalam tentang kurikulum mana yang lebih memenuhi unsur dari ketiga kompetensi kewarganegaraan dan akan menemukan kelebihan, kekurangan serta dampak kompetensi kewarganegaraan dalam kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar.

KAJIAN TEORITIS

a. Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 salah satu kurikulum yang dirancang dan dikembangkan dari kurikulum yang berlaku sebelumnya dari kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) pada tahun 2006. Hal yang diutamakan pada kurikulum 2013 menekankan pada beberapa aspek untuk meningkatkan kompetensi pada tingkah laku, keterampilan, serta pengetahuan. Maka dengan demikian dapat dipahami bahwa “Kurikulum 2013 adalah sebuah kurikulum yang dikembangkan untuk meningkatkan dan menyeimbangkan kemampuan *soft skill* dan *hard skill* yang berupa sikap, keterampilan, dan pengetahuan” (Fadilah, 2015, h.16). Khoirurrijal, dkk (2022, h. 5) kurikulum 2013 revisi merupakan perbaikan dari kurikulum sebelumnya, sejalan dengan perkembangan zaman yang menuntut adanya perubahan kurikulum. Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kurikulum 2013 merupakan

kurikulum yang dikembangkan untuk meningkatkan mutu pendidikan disesuaikan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam dunia pendidikan.

b. Kurikulum Merdeka

kurikulum merdeka merupakan kurikulum pengembangan dalam upaya pemulihan pembelajaran ditengah permasalahan yang terjadi, yaitu covid 19 dengan mencanangkan kurikulum merdeka sebagai kurikulum pemulihan pembelajaran.. Khoirurrijal, dkk (2022, h. 7) kurikulum merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran akurikuler yang beragam, konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi.

c. Pendidikan Kewarganegaraan

Taniredja (2017, h.1) “Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antarwarga negara dengan negara serta serta pendidikan pendahuluan bela negara menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara (penjelasan Pasal 39 Undang-Undang No. 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional)”.

d. Kompetensi Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan di mana seseorang mempelajari orientasi, sikap, dan perilaku politik sehingga yang bersangkutan memiliki political knowledge, awareness, attitude, political efficacy, dan political participation serta kemampuan mengambil keputusan politik secara rasional dan menguntungkan bagi dirinya juga bagi masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu dibutuhkan pendidikan PKn yang mengandung nilai, norma, dan akhlak untuk peserta didik dikalangan pendidikan sekolah dasar sebagai pondasi watak dan jiwa mereka di kemudian hari, supaya tidak terombang ambing perkembangan zaman. “Kompetensi kewarganegaraan adalah seperangkat pengetahuan, nilai dan sikap serta keterampilan yang mendukung menjadi warga negara yang partisipatif dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara” (Branson, 1999, h. 8-9; Pratomo, 2016, h. 2).

Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan tentunya memiliki tolak ukur dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan, yaitu kompetensi kewarganegaraan. “Kompetensi adalah rangkaian dari pengetahuan, keterampilan disposisi (sikap) tentang ilmu pengetahuan, dan sikap terhadap proses belajar (dorongan untuk belajar dan motivasi untuk menggali konsep lebih dalam)” (Kemendikbud RI, 2022, h.40). Kompetensi

merupakan suatu rangkaian kemampuan yang dibutuhkan seseorang yang harus dicapai berlandaskan pengetahuan, keterampilan serta sikap. Penelitian yang dilakukan Efendi (2020) menunjukkan peranan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sarana pengembangan civic competences, yakni civic knowlegde, civic skill, civic disposition menjadi sarana yang tepat dalam pengembangan kompetensi kewarganegaraan dalam proses partisipasi politik siswa SD menjadikan siswa memiliki jiwa yang bertanggungjawab dalam kehidupan.

Kompetensi ini nantinya akan memberi bekal kepada setiap warga defable agar menjadi warganegara cerdas dan baik (be smart and good citizenship). “Menurut kurikulum berbasis kompetensi, PKn adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio-kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945” Awiria dan Latifah (2019, h.1). Kompetensi kewarganegaraan merupakan suatu kemampuan yang harus dikuasai oleh siswa, menguasai aspek pengetahuan, sikap, nilai serta norma dan keterampilan untuk mencapai tujuan pembentukan karakter pribadi warga negara yang bertanggung jawab serta demokratis. Dalam materi pelajaran pendidikan kewarganegaraan memiliki tiga komponen kompetensi kewarganegaraan, yaitu:

1) Kompetensi pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge)

Kompetensi pengetahuan kewarganegaraan merupakan kompetensi atau kecakapan siswa untuk menjelaskan ruang lingkup materi Pendidikan Kewarganegaraan (civic education) (Ubaedillah, 2017, h.16-17). Pengetahuan kewarganegaraan berkaitan dengan nilai atau norma yang harus diketahui sebagai warga negara yang baik. Pengetahuan kewarganegaraan tercipta melalui kemampuan akademik keilmuan dari berbagai teori politik, hukum, norma serta karakter bangsa. Pengetahuan kewarganegaraan memiliki beberapa unsur-unsur yang membentuk, yaitu: hukum, politik, dan moral.

2) Kompetensi Keterampilan Kewarganegaraan (civic skill)

Kompetensi keterampilan kewarganegaraan merupakan keterampilan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan, agar pengetahuan yang diperoleh dan menjadi sesuatu yang bermakna serta mampu menerapkannya dan mampu meyelesaikan permasalahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Civic skill merupakan keterampilan apa yang seharusnya dimiliki oleh peserta didik atau warga negara yang meliputi

keterampilan intelektual, memiliki pengetahuan serta partisipasi. Keterampilan intelektual ini menjadikan peserta didik mampu berpikir kritis dan menganalisis informasi dari lingkungan dengan baik dan benar.

3) Kompetensi Sikap Kewarganegaraan (civic disposition)

Kompetensi sikap kewarganegaraan merupakan suatu kompetensi yang berkaitan dengan kesadaran diri dan komitmen warga negara yang menjadikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Quigley, Buchanan dkk (1991), Komalasari (2011, h.50-51) merumuskan civic disposition adalah sikap dan kebiasaan berpikir warga negara yang menopang berkembangnya fungsi sosial yang sehat dan jaminan kepentingan umum dari sistem demokrasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di sekolah-sekolah sasaran dalam pelaksanaan kurikulum 2013 serta sekolah-sekolah penggerak dalam pelaksanaan kurikulum merdeka ditingkat sekolah dasar di kota Medan. Sesuai dengan observasi peneliti yang menjadi sekolah sasaran penelitian yang pertama SDN Advent 2 Medan, Jl. Dr. Mansyur gg Berkat No. 9, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan untuk sekolah penerapan kurikulum 2013 dan di SDN 060825 Jl. Ismailiyah No. 83, Kecamatan Medan Area, Kota Medan sebagai salah satu sekolah penggerak untuk pengimplementasian kurikulum merdeka di tingkat sekolah dasar. Waktu penelitian kesekolah akan dilakukan pada semester genap Tahun ajaran 2022/2023. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif (qualitative research) yang digunakan untuk memahami fenomena-fenomena apa yang terjadi, mengapa itu terjadi, dan bagaimana terjadinya fenomena tersebut. Dimana fakta tersebut mudah untuk dipahami dan bersifat deskriptif kualitatif.

Subjek dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru kelas 2 dan guru kelas 5 di SD Advent 2 Medan untuk sekolah penerapan kurikulum 2013 dan di SDN 060825 kota Medan sebagai salah satu sekolah penggerak untuk pengimplementasian kurikulum merdeka. Selanjutnya adalah dosen FIS Unimed ahli materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah teknik analisis data oleh Miles dan Huberman dengan model interaktif, yaitu menggunakan 4 tahapan proses analisis data,

yaitu pengumpulan data, reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing/verification). Dalam menentukan hasil akhir suatu penelitian keabsahan data sangatlah mendukung dalam pemeriksaan data. Teknik pemeriksaan data yang akan digunakan, yaitu teknik triangulasi Triangulasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi teknik melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sehingga ditemukan kompetensi kewarganegaraan dalam kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka disekolah dasar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi yang dilakukan adalah mengamati proses atau kegiatan pembelajaran dan melihat bagaimana penerapan kompetensi Kewarganegaraan pada proses pembelajaran, mengamati aktivitas siswa dalam menerapkan kompetensi Kewarganegaraan baik dalam sekolah penerapan kurikulum 2013 dengan sekolah penerapan kurikulum merdeka. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam dan terstruktur dengan 7 orang narasumber guru kelas 2, gurus kelas 5 serta kepala sekolah SD Swasta Advent 2 sekolah kurikulum 2013 dan SD N 060825 Medan sekolah penerapan kurikulum merdeka. Dosen FIS sebagai dosen ahli Pendidikan Kewarganegaraan. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data dengan dokumentasi melalui buku-buku dan jurnal yang relevan terkait dengan kompetensi Kewarganegaraan dalam kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka.

Buku yang diteliti dan diamati termasuk buku Pendidikan Kewarganegaraan, buku pelajaran yang digunakan di dua sekolah yang menerapkan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka, serta perangkat pembelajaran yang disusun oleh guru kelas 2 dan guru kelas 5 dalam pembelajaran. Tidak lupa juga dokumentasi terkait foto-foto yang akan membuktikan hasil dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti untuk mengamati unsur kompetensi Kewarganegaraan, yaitu pengetahuan Kewarganegaraan (civic knowledge), sikap Kewarganegaraan (civic disposition), dan keterampilan Kewarganegaraan (civic skill) dari dari kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka.

Berdasarkan hasil pengumpulan data, reduksi data, serta penyajian data, hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti selama dua bulan ditemukan hasil analisis kompetensi kewarganegaraan dalam kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka mata

pelajaran pendidikan Kewarganegaraan di tingkat sekolah dasar dapat dilihat dari ruang lingkup penyajian materi, perangkat pembelajaran, serta pelaksanaan pembelajaran dengan memuat ketiga kompetensi kewarganegaraan, yaitu pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), keterampilan kewarganegaraan (civic skill), dan watak atau karakter kewarganegaraan (civic disposition).

Adapun materi pembelajaran dari kedua kurikulum baik kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka secara bersamaan materi pembelajarannya terdiri dari pengetahuan, sikap dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik sebagai tolak ukur pencapaian kompetensi kewarganegaraan. Kemudian untuk kajian materi ditemukan hasil bahwa pada kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka memuat materi Pancasila sebagai intinya pembelajaran terlihat pada hasil wawancara dengan dosen ahli Pendidikan Kewarganegaraan dalam KI dan KD kurikulum 2013 telah disusun secara terstruktur muatan kompetensi yang hendak dicapai oleh peserta didik. Kemudian pada kurikulum merdeka dengan adanya program penguatan profil pelajar Pancasila yang membuktikan kurikulum merdeka menjadikan Pancasila sebagai intinya pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Hasil reduksi data dan display data dapat disimpulkan bahwa dari wawancara yang dilakukan kepada guru terkait dengan muatan kompetensi dalam kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka bahwa kompetensi kewarganegaraan sudah termuat dan diterapkan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, hanya saja ada kendala dalam penerapan beberapa kompetensi pada saat pembelajaran. Dimana peserta didik tidak semuanya mampu mencapai kompetensi pada ranah keterampilan berpikir kritis khususnya pada penerapan kurikulum 2013 dikarenakan perbedaan tingkat berpikir peserta didik. Kompetensi pada kurikulum merdeka dalam penerapan sudah memuat ketiga kompetensi, dan lebih megutamakan terhadap kompetensi sikap yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Namun adanya kendala pada pengalokasian waktu dikarenakan banyaknya kegiatan yang harus dilaksanakan sehingga tidak dapat semua kompetensi kewarganegaraan dapat diterapkan.

Pendidikan kewarganegaraan menjadi salah satu pembelajaran yang penting, yaitu dalam pembentukan karakter dan kepribadian peserta didik sesuai dengan aturan-aturan dalam masyarakat terutama dalam berbangsa dan bernegara. Peserta didik yang memiliki karakter kepribadian yang baik dan benar akan mencerminkan nilai-nilai yang termuat

dalam pengamalan Pancasila dan UUD 1945. Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan tentunya memiliki tolak ukur dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan, yaitu kompetensi kewarganegaraan. “Kompetensi adalah rangkaian dari pengetahuan, keterampilan disposisi (sikap) tentang ilmu pengetahuan, dan sikap terhadap proses belajar (dorongan untuk belajar dan motivasi untuk menggali konsep lebih dalam)” (Kemendikbud RI, 2022, h.40). Kompetensi merupakan suatu rangkaian kemampuan yang dibutuhkan seseorang yang harus dicapai berlandaskan pengetahuan, keterampilan serta sikap.

1. Analisis Kompetensi Kewarganegaraan dalam Kurikulum 2013

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan selalu mengalami perkembangan disesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan zaman pada pendidikan di Indonesia. Lubis (2018, h.25) mengatakan “Pendidikan Kewarganegaraan merupakan proses pembelajaran yang berusaha untuk membangun civic knowledge, civic skill, civic disposition peserta didik, sehingga tujuan untuk membentuk warga negara yang baik dapat terwujud”. Pendapat Winarno (2013, h. 36) mengatakan berdasarkan naskah penguatan kurikulum mata pelajaran PPKn terbitan pusat kurikulum dan perbukuan kemendikbud 2012, dinyatakan bahwa pelajaran PPKn disesuaikan dengan pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Perubahan atau disebut sebagai penyesuaian ini dimasukkan agar dapat mengakomodasikan perkembangan dan persoalan yang berkembang dimasyarakat.

Dibutuhkan pendidikan PPKn yang mengandung nilai, norma, dan akhlak untuk peserta didik dikalangan pendidikan sekolah dasar sebagai pondasi watak dan jiwa mereka di kemudian hari, supaya tidak terombang ambing perkembangan zaman. “Kompetensi kewarganegaraan adalah seperangkat pengetahuan, nilai dan sikap serta keterampilan yang mendukung menjadi warga negara yang partisipatif dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara” (Branson, 1999, h. 8-9; Pratomo, 2016, h. 2).

Kompetensi ini nantinya akan memberi bekal kepada setiap warga defable agar menjadi warganegara cerdas dan baik (be smart and good citizenship). “Menurut kurikulum berbasis kompetensi, PPKn adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio-kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945” Awiria dan Latifah (2019, h.1). Maka ruang lingkup kajian materi pada kurikulum 2013 memuat tiga unsur kompetensi kewarganegaraan, yaitu

pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), keterampilan kewarganegaraan (civic skill), dan watak atau karakter kewarganegaraan (civic disposition). Ketiga kompetensi kewarganegaraan dalam kurikulum 2013, yaitu:

- 1) Pengetahuan kewarganegaraan (Civic knowledge), terkait kedalam KI 3 pengetahuan, yakni Pancasila, UUD NKRI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika sebagai dimensi PPKn yang semuanya melebur kedalam rumusan Kompetensi Dasar (KD)
- 2) Keterampilan kewarganegaraan (Civic skill), berkaitan dengan kompetensi inti 4 (KI 4) yaitu keterampilan.
- 3) Sikap kewarganegaraan (Civic disposition), berkaitan dengan kompetensi inti 1 dan 2 (KI 1 dan KI 2), yaitu sikap spritual dan sosial.

Kompetensi inti dan kompetensi dasar pada kurikulum 2013 sudah memuat kompetensi kewarganegaraan. Berdasarkan keseimbangannya khusus untuk SD/MI lingkup isi Pendidikan Kewarganegaraan dikemas menjadi kompetensi inti dan kompetensi dasar disusun berdasarkan tema. Muatan PPKn dikelas rendah (kelas 2) terdiri dari 4 tema setiap tema terdiri dari 4 subtema. Setiap subtema diuraikan kedalam 6 pembelajaran. Satu pembelajaran dialokasikan untuk satu hari. Untuk muatan PPKn dikelas tinggi (kelas 5) terdiri dari 4 tema setiap tema terdiri dari 3 subtema.

2. Analisis Kompetensi Kewarganegaraan dalam Kurikulum Merdeka

Kompetensi Kewarganegaraan dalam kurikulum merdeka memiliki kelebihan dan kekurangan serta dampak pada pembelajaran Pendidikan Pancasila di Sekolah Dasar. Kompetensi Kewarganegaraan di sekolah dasar pada kurikulum merdeka diubah menjadi capaian pembelajaran (CP) karena bagi kurikulum merdeka pengetahuan, keterampilan dan sikap dirangkai sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh dari suatu mata pelajaran dan tidak sepatutnya dipisahkan, sehingga pada kurikulum merdeka kompetensi kewarganegaraan disusun kedalam capaian pembelajaran sesuai dengan fase yang telah ditentukan. Mata pelajaran pendidikan Kewarganegaraan kembali pada kurikulum sebelumnya pada KTSP menjadi mata pelajaran terpisah yang membuat guru lebih fokus dalam proses pembelajaran ketiga kompetensi kewarganegaraan.

Ruang lingkup kajian materi masih sama dengan kurikulum 2013 namun disebut sebagai 4 elemen kunci, yaitu:

- 1) Elemen Pancasila
- 2) Undang-undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945
- 3) Bhineka Tunggal Ika
- 4) Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kajian elemen kunci diatas termasuk kedalam pengembangan pengetahuan kewarganegaraan. Perubahan tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan juga berkembang sesuai dengan keputusan kepala BSKAP No. 008 Tahun 2022 peserta didik mampu:

- 1) Berakhlak mulia dengan didasari keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui sikap mencintai sesama manusi, mencintau negara dan lingkungannya untuk mewujudkan persatuan dan keadilan sosial.
- 2) Memahami makna dan nilai-nilai Pancasila, serta proses perumusannya sebagai dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup bangsa, serta mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
- 3) Menganalisis konstitusi dan norma yang berlaku, serta menyelaraskan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di tengah-tengah masyrakat global.
- 4) Memahami jati dirinya sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang berbhineka, serta mampu bersikap adil dan tidak membeda-bedakan jens kelamin, SARA (Suku, Agama,Ras, Antargolongan), status sosial ekonomi, dan penyandang disabilitas.
- 5) Menganalisis karakteristik bangsa Indonesia dan kearifan lokal masyarakat sekitarnya, dengan kesadaran dan komitmen untuk menjaga lingkungan, mempertahankan kutuhan NKRI, serta berperan aktif dalam kancah global

Tujuan Pendidikan Pancasila diatas dapat dianalisis kompetensi kewarganegaraan semakin mengalami perkembangan. Begitu juga dalam pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik dikembangkan kegiatan Profil pelajar Pancasila yang terdiri dari enam dimensi yang nantinya akan diingat, dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, enam elemen tersebut, yaitu:

- 1) Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia
- 2) Mandiri
- 3) Bergotong royong
- 4) Brkebhinekaan global

- 5) Bernalar kritis
- 6) Kreatif

Enam elemen profil pelajar Pancasila akan diajarkan berdasarkan tahap perkembangan psikologis kognitif anak dan remaja usia sekolah. Dengan adanya kegiatan profil pelajar Pancasila tersebut maka pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum merdeka sudah memenuhi inti pembelajaran pendidikan Kewarganegaraan adalah Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup bangsa Indonesia, nilai-nilai Pancasila.

Namun, bagaimana dengan pelaksanaannya dalam kegiatan pembelajaran. Tentunya kurikulum merdeka masih bersifat prototipe masih dibutuhkan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kepada sekolah dan tenaga pendidik agar mampu mengaplikasikan kompetensi kewarganegaraan dalam proses pembelajaran. Guru masih perlu pemahaman dalam penyusunan program pembelajaran dalam modul ajar serta tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam setiap aktivitas pembelajaran. Kurangnya pemahaman guru terhadap kurikulum merdeka akan berdampak pada capaian pembelajaran, guru masih terkendala dengan penyesuaian waktu, serta kerja sama orangtua dalam setiap pelaksanaan proyek pelajar Pancasila dalam kurikulum merdeka guru merasa terbebani diperlukan kreativitas guru. Sekolah belum mendalami kurikulum merdeka masih bersifat mendasar oleh sebab itu berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah melakukan kegiatan-kegiatan dalam pengembangan kompetensi guru untuk implementasi kurikulum.

Dari penggunaan kata kerja operasional (KKO) juga didapatkan hasil berdasarkan hasil dokumentasi ditemukan hasil persentasi pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah dasar baik kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka sebagai berikut:

Tabel 1.1. Presentase penggunaan KKO dalam kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka

No	Kompetensi	Kurikulum 2013 %	Kurikulum Merdeka %
1	Pengetahuan kewarganegaraan	25%	31,37%
2	Keterampilan kewarganegaraan	25%	41,18%
3	Sikap kewarganegaraan	50%	27,45%

4	Profil Pelajar Pancasila		20%
---	--------------------------	--	-----

Dari data tabel diatas penggunaan KKO dalam kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka maka berdasarkan permendikbutristek No. 37 Tahun 2018 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SD/MI dari 96 KD didominasi oleh kompetensi sikap 48 KD dengan jumlah persentase 50%, diikuti ranah kompetensi keterampilan dan pengetahuan 24 KD sama dengan jumlah persentase 25%. Namun ditemukan bahwa ada beberapa kompetensi kewarganegaraan yang belum mampu dikuasai oleh peserta didik, salah satunya adalah kompetensi keterampilan (civic skill) dikarenakan perbedaan tingkat berpikir peserta didik. Sedangkan Keputusan Badan BSKAP No. 008/H/KR/2022 pada kurikulum merdeka capaian pembelajaran jenjang pendidikan dasar mata pelajaran pendidikan Pancasila 51 penggunaan KKO dengan ranah pengetahuan 16 (31,37%), untuk ranah keterampilan 21 (41,18%), dan kemudian ranah sikap 14 (27,45%). Dapat dilihat dari persentasi penggunaan KKO dalam capaian pembelajaran didominasi oleh kompetensi keterampilan, namun jika ditambahkan dengan persentasi proyek penguatan profil Pancasila yang dialokasikan sebesar 20% dalam pembelajaran yang termasuk ranah sikap maka jumlah persentasi kompetensi sikap dalam kurikulum merdeka dengan persentasi 47,45%. Maka kurikulum merdeka mendominasi kompetensi sikap dan dilanjutkan oleh kompetensi keterampilan kemudian kompetensi pengetahuan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari analisis kompetensi kewarganegaraan dalam kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan pada tingkat sekolah dasar dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Hasil kajian kompetensi pada kurikulum 2013 mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang disebut mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan kajian materi yang terintegrasi kedalam tema besar. Dimana ranah kompetensi dibagi kedalam kompetensi inti (KI) dan kompetensi dasar (KD) setiap ranah kompetensi memuat pengetahuan, sikap, dan keterampilan dengan sebaran KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4 kemudian diturunkan kedalam kelompok KD 1, KD 2, KD 3, dan KD 4. Dimana KD 3 terkait pada kompetensi pengetahuan (civic knowledge),

kemudian diikuti oleh kompetensi keterampilan (civic skill), dan terakhir kompetensi sikap baik spritual dan sosial (civic dispotition). Setiap ranah tersebut termuat pada materi pembelajaran dalam kurikulum 2013 dan diimplementasikan berdasarkan KI dan KD yang sudah dikembangkan dalam perangkat pembelajaran. Muatan kompetensi kewarganegaraan berdasarkan analisis dokumentasi kurikulum 2013 ditemukan kelebihan dan kekurangan setiap ranah kompetensi kewarganegaraan, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum 2013 mengandung muatan kompetensi kewarganegaraan secara utuh yang terdiri dari pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, dan sikap kewarganegaraan. Berdasarkan permendikbutristek No. 37 Tahun 2018 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan SD/MI dari 96 KD didominasi oleh kompetensi sikap 48 KD dengan jumlah persentase 50%, diikuti ranah kompetensi keterampilan dan pengetahuan 24 KD sama dengan jumlah persentase 25%. Namun ditemukan bahwa ada beberapa kompetensi kewarganegaraan yang belum mampu dikuasai oleh peserta didik, salah satunya adalah kompetensi keterampilan (civic skill) dikarenakan perbedaan tingkat berpikir peserta didik. Kemudian kritikan lain pada pembelajaran PPKn dalam kurikulum 2013 muatan mata pelajaran seharusnya dipisahkan dari tema untuk mengoptimalkan dan memfokuskan ketiga ranah kompetensi kepada peserta didik sehingga kajian materi pendidikan kewarganegaraan dapat diterima peserta didik secara optimal.

2. Kompetensi Kewarganegaraan di sekolah dasar pada kurikulum merdeka diubah menjadi capaian pembelajaran (CP) karena bagi kurikulum merdeka pengetahuan, keterampilan dan sikap dirangkai sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh dari suatu mata pelajaran dan tidak sepatutnya dipisahkan, sehingga pada kurikulum merdeka kompetensi kewarganegaraan disusun kedalam capaian pembelajaran sesuai dengan fase yang telah ditentukan. Mata pelajaran pendidikan Kewarganegaraan kembali pada kurikulum sebelumnya pada KTSP menjadi mata pelajaran terpisah yang membuat guru lebih fokus dalam proses pembelajaran ketiga kompetensi kewarganegaraan. Ruang lingkup kajian materi masih sama dengan kurikulum 2013. Badan pembinaan ideologi Pancasila (BPIP) menyusun 15 buku pelajaran Pendidikan Pancasila dari PAUD sampai perguruan tinggi sebanyak 70% isi buku praktik ber-Pancasila dalam kehidupan sehari-

hari contoh sikap bergotong royong, dan berkeadilan sosial dan 30% teori misalnya sejarah Pancasila. Kemudian setelah dicermati pada penggunaan KKO dalam kurikulum merdeka pada Keputusan Badan BSKAP No. 008/H/KR/2022 capaian pembelajaran jenjang pendidikan dasar mata pelajaran pendidikan Pancasila 51 penggunaan KKO dengan ranah pengetahuan 16 (31,37%), untuk ranah keterampilan 21 (41,18%), dan kemudian ranah sikap 14 (27,45%). Dapat dilihat dari persentasi penguasaan KKO dalam capaian pembelajaran didominasi oleh kompetensi keterampilan, namun jika ditambahkan dengan persentasi proyek penguatan profil Pancasila yang dialokasikan sebesar 20% dalam pembelajaran yang termasuk ranah sikap maka jumlah persentasi kompetensi sikap dalam kurikulum merdeka dengan persentasi 47,45%. Maka kurikulum merdeka mendominasi kompetensi sikap dan dilanjutkan oleh kompetensi keterampilan kemudian kompetensi pengetahuan.

3. Kompetensi kewarganegaraan dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di dekalah dasar memberikan nampak pada pengembangan sikap maupun karakter peserta didik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Permasalahan terjadi pada guru dalam penyesuaian waktu dan siswa perbedaan tingkat keterampilan yang belum mampu seutuhnya menerapkan ketiga kompetensi dalam setiap kurikulum mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka sedangkan kompetensi kewarganegaraan dalam setiap kurikulum sudah mengandung muatan kompetensi kewarganegaraan secara utuh yang terdiri dari pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, dan sikap kewarganegaraan dan mengutamakan kompetensi sikap /karakter kewarganegaraan sesuai dengan tujuan pendidikan kewarganegaraan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagi sekolah, diharapkan siap menerima perkembangan kurikulum sekolah yang berlaku serta perubahan baru terhadap kurikulum pendidikan kewarganegaraan khususnya di tingkat sekolah dasar.
2. Bagi guru, diharapkan dalam proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan menerapkan secara optimal ketiga ranah kompetensi kewarganegaraan, yaitu pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), keterampilan kewarganegaraan

(civic skill), dan watak atau karakter kewarganegaraan (civic disposition) agar tercapai tujuan Pendidikan Kewarganegaraan yang seutuhnya.

3. Bagi peneliti selanjutnya, karena keterbatasan waktu dan batasan masalah diharapkan masih perlunya kajian mendalam serta bukti-bukti empirik praksis bagaimana ketercapaian dan muatan kompetensi kewarganegaraan pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan pada kurikulum yang berlaku disekolah khususnya di sekolah dasar yang menjadi pendidikan awal dalam membina karakter peserta didik melalui Pendidikan Kewarganegaraan.

DAFTAR REFERENSI

- Arikunto. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Albantani, A.M.A (2015). Implementasi Kurikulum 2013 pada Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah Ibtidiyah. *Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban*. 2(2): 178-191
- Andita, R., Puspa, D., & Hasnawati. (2018). Studi Deskriptif Permasalahan Pembelajaran PKn dalam Membentuk Karakter Siswa Kelas V SD 12 Kota Bengkulu. *Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 25-33.
- Anggraena, Y. (2022). *Kajian Akademik Kurikulum untuk Pemulihan Pembelajaran*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Pembelajaran BSKAP Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- Branson, MS. (1999). *Belajar Civic Education dari Amerika*. Yogyakarta.
- Doğanay, A. (2012). A curriculum framework for active democratic citizenship education. In M. Print & D. Lange (Eds.), *Schools, Curriculum and Civic Education for Building Democratic Citizens* (pp. 19–39). Rotterdam, Boston, Taipei: Sense Publisher.
- Efendi, Irwan. (2020). Pendidikan Kewarganegaraan: Wahana Pengembangan Kompetensi Warganegara Dalam Pengenalan Partisipasi Politik Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 7 (2) 149-162. <https://doi.org/10.30997/dt.v7i2.2635>
- Frailon, J., Schulz, W., & Ainley, J. (2012). ICCS 2009 Asian report: Civic knowledge and attitudes among lower-secondary students in five Asian countries. (J. Frailon, W. Schulz, & J. Ainley, Eds.), *International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) All*. Amsterdam: International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). Retrieved from <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eric&AN=ED544595&site=e-ehost-live>
- BSKAP. (2022). *Keputusan BSKAP Nomor 009 Tahun 2022 tentang Dimensi, Elemen dan Subelemen Profil Pelajar Pancasila pada Kurikulum Merdeka*. Jakarta: Kemendikbudristek.

- Fadilah. (2015). Implementasi Kurikulum 2013 dalam Pembelajaran SD/MI,SMP, Mts. & SMA/MA. Yogyakarta. AR-Ruzz Media.
- Gandamana, Apiek., Sorta Simanjuntak. (2018). Perbandingan Kompetensi Kewarganegaraan dalam kurikulum 2006 dan kurikulum 2013 mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. *Jurnal Sekolah (JS)*, 2 (2), 17-22. <https://doi.org/10.24114/js.v2i2.9508>
- Komalasari, K. (2011). Kontribusi Pembelajaran Konstektual untuk Pengembangan Kompetensi Kewarganegaraan Peserta Didik SMP di Jabar. *Mimbar*, 47-55.
- Khoirurrijal, Fadriati, Sofia, & dkk. (2022). Pengembangan Kurikulum Merdeka. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Kemendikbud RI. (2022). Tanya Jawab Kurikulum Merdeka. Diakses dari Direktorat Sekolah Dasar, Situs Web <https://ditpsd.kemdikbud.go.id/>
- Lubis, M. A. (2018). Pembelajaran PPKn Teori Pengajaran Abad 21 di SD/MI. Yogyakarta: Samudra Biru.
- latifah, A. &. (2019). Pembelajaran PKN SD. Yogyakarta: Samudra Biru (Anggota IKAPI).
- Moleong, L. J. (2004). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyoto Galih Fuji, S. (2017). Pengaruh Model Project Citizen dengan Pendekatan Saintifik terhadap Penguasaan Kompetensi Kewarganegaraan dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *Jurnal Civics*, 105-118
- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI. (2022). Peraturan Menteri tentang standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah (Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022). Jakarta. Diakses dari <https://bit.ly/dasar-hukum-kurikulum-merdeka>
- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI. (2022). Peraturan Menteri tentang standar isi pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah (Permendikbudristek nomor 7 tahun 2022). Jakarta. Diakses dari <https://bit.ly/dasar-hukum-kurikulum-merdeka>
- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI. (2022). Peraturan Menteri tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran (Permendikbudristek nomor 56 M tahun 2022). Jakarta. Diakses dari <https://bit.ly/dasar-hukum-kurikulum-merdeka>
- Nusarastriya, Y. H. (2013). Permasalahan dan Tantangan Guru PKN Menghadapi Perubahan Kurikulum 2013. *Satya Widya*, 23-29.
- Nurlatifah, A. (2019). Pembelajaran PKN SD. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Naggala, Agil. (2021). Pengembangan Kurikulum Pendidikan Keewaragnegaraan dalam Kampus Merdeka berdasar Optimalisasi Kompetensi Kewarganegaraan serta Pelayanan Berkualitas terhadap Mahasiswa. *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5 (2), 123 – 138. <http://ejournal.unima.ac.id/index.php/jce>.

- Nurani, Dwi, dkk. (2022). *Serba-Serbi Kurikulum Merdeka Kekhasan Sekolah Dasar*. Jakarta. Direktorat Sekolah Dasar.
- urbasari, V. A., & Dr. Mukhamamad, M. (2017). Studi Komparasi Muatan Kompetensi Kewarganegaraan dalam Kurikulum 2006 dan 2013 untuk Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum* , 317-327.
- Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi.
- Permendikbut No. 18A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum 2013.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 37 Tahun 2018 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Taniredja, Tukiran. 2017. *Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Ubaedillah. 2017. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi*. Jakarta. Kencana.
- Winataputra, Udin S. 2001. *Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Sistematis Pendidikan Demokrasi*. Disertasi S3 IPS. Bandung: PPs UPI. Tidak diterbitkan.
- Winarno. (2014). *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Isi Strategi, dan Penilaian*. Jakarta: Bumi Aksara.